






 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus</b></p>	Nomor SOP	OT.01.02-025-053.De.1
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 25 Oktober 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</p>  <p style="text-align: center;">Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001</p>
	<b>Judul SOP Mikro</b>	<b>Penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus</b>
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019</li> <li>3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam</li> <li>4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019</li> <li>5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Otonomi Khusus</li> <li>2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan</li> <li>3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik</li> <li>5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik</li> </ol>	
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang Otonomi Khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi</li> <li>2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)</li> <li>3. Kendaraan roda dua dan empat</li> <li>4. Telepon, Faksimile, dsb</li> </ol>	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :	
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus	Disimpan dalam data elektronik dan manual	

**SOP Mikro Penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Asdep	Kabid	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabid dan Pelaksana untuk menyiapkan pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus				Arahan Deputi, Rencana Kerja, dsb	10 Menit	Disposisi/arahan Asdep	
2	Melaksanakan koordinasi teknis dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan konsep rencana kegiatan, pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus				Disposisi/arahan Asdep	60 Menit	Koordinasi teknis + Disposisi	
3	Menyiapkan konsep rencana kegiatan, pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus beserta dokumen administratif lainnya kemudian disampaikan kepada Kabid untuk diperiksa				Koordinasi teknis + Disposisi	90 Menit	Konsep rencana kegiatan + dokumen administratif	
4	Meneliti konsep rencana kegiatan, pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus, jika setuju dilaporkan kepada Asdep, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki				Konsep rencana kegiatan + dokumen administratif	30 Menit	Konsep rencana kegiatan telah diteliti	
5	Memeriksa konsep rencana kegiatan, pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus jika setuju maka akan dijadikan sebagai bahan pemantauan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki				Konsep rencana kegiatan telah diteliti	10 Menit	Rencana kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang Otonomi Khusus	

